

BAB IV

KESIMPULAN

Strategi UNISFA dalam menjalankan mandatnya dengan mendukung kekuatan keamanan Abyei dengan menjaga keamanan perbatasan flashpoint antara Sudan utara dan selatan oleh beberapa tentara militer dari beberapa anggota UNISFA. UNISFA dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa memutuskan untuk melakukan upaya oleh Pemerintah Sudan dan Pemerintah Sudan Selatan untuk demiliterisasi *Safe Demilitarized Border Zone* termasuk "14 Mile Area," dan untuk melaksanakan *the Joint Border Verification and Monitoring Mechanism* (JBVMM) sesuai dengan resolusi Dewan 2046 dan AU Dewan Perdamaian dan Keamanan Roadmap 24 April 2012, menggarisbawahi pentingnya membangun dan mempertahankan pemantauan JBVMM efektif Zona Perbatasan aman demiliterisasi termasuk "14 Mile Area". UNISFA juga mengupayakan kekuatan internal Abyei dengan memberikan pelatihan kepada polisi Abyei dan mengajarkan tentang hukum untuk menjaga keamanan infrastruktur minyak di Abyei.

Strategi yang sudah dilakukan oleh UNISFA dalam penyelesaian konflik di Abyei belum mendapatkan hasil. Untuk upaya yang sudah dilakukan oleh negara Afrika dan beberapa negara perwakilan Abyei telah berupaya Negoisasi, Mediasi akan tetapi belum menemukan hasil dikarenakan di dalam internal Abyei sendiri terjadi dua kelompok yang berbeda keinginan. Ngok Dinka yang ingin bergabung dengan Sudan Selatan sedangkan Missery ingin bergabung dengan Sudan Utara. Hal ini juga semakin mempersulit UNISFA untuk menyelesaikan konflik di Sudan yang sudah berkepanjangan karena adanya referendum dari kelompok Ngok Dinka.

Dalam mengatasi keamanan UNISFA sangat membantu dalam pengawalan para imigrasi warga sipil. Hal ini disebabkan karena tentara Sudan dan Sudan Selatan bisa sewaktu

– waktu melakukan perlawanan satu sama lain untuk merebut kekuasaan. Dan kemudian UNISFA membentuk daerah bebas dari tentara kedua negara tersebut. Ditambah dengan pelatihan untuk kepolisian internal Abyei sehingga bisa melindungi dan menjaga keamanan warga sipil dan juga hasil minyak mereka.

Dalam penyelesaian konflik perebutan wilayah Abyei antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan melalui tahap peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding menurut teori John Galtung. Dalam proses penyelesaian melalui peacemaking, UNISFA melakukan upaya untuk memberikan fasilitas keamanan dan stabilitas perdamaian yang ada di Abyei. Didukung dengan perjanjian 20 Juni 2011, menyatakan bahwa Abyei bebas dari tentara senjata oleh pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kecuali tentara sukarela dari UNISFA. UNISFA sendiri terdapat di tahun 2011 terdapat 4.200 militer dan 50 personel kepolisian dan dibantu warga sipil. Sedangkan di tahun 2013, terjadinya penambahan personel menjadi 5.326 militer dan 50 Personel kepolisian. Dipertahan tahun 2011, kembaliny tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan di wilayah Abyei yang menghambat kerja UNISFA dalam menjalankan mandatnya. Adanya perjanjian 29 Juni dan 30 Juli yang berisikan bahwa Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan bekerjasama untuk membentuk kemanan perbatasan di wilayah Abyei dengan membentuk Safe Demilitarized Border Zone yang diamankan oleh Joint Border Verification and Monitoring Mechanism yang dibantu oleh UNISFA demi terjalannya perdamaian di wilayah Abyei.

Proses peacebuilding sebagai tahap akhir untuk tahap penyelesaian konflik dengan cara meningkatkan kualitas dan kapasitas Kepolisian Abyei. Hal ini dilakukan dengan cara UNISFA memberikan pelatihan, memberikan wawasan umum tentang hukum dan ketertiban. Diharapkan dengan meningkatnya kualitas kepolisian Abyei dapat menjaga keamanan warga sipil dan membendung kekerasan fisik dan ancaman kekerasan seksual terhadap perempuan seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Dengan cara ini juga diharapkan masyarakat dan

kepolisian Abyei dapat menjaga keamanan untuk infrastruktur minyak sehingga tidak adanya konfrontasi dari pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dan mengembangkan perekonomian wilayahnya karena wilayah Abyei pemasok minyak terbesar ketiga di Uni Afrika.

Hasil dari upaya dan strategi UNISFA sebagai organisasi internasional dalam penyelesaian konflik perebutan wilayah Abyei anatar Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan adalah gagalnya perjanjian 20 Juni 2011 yang menghambat kinerja UNISFA dan kegelisahan masyarakat akan terjadinya ancaman keamanan. Pembersihan ranjau disekitaran wilayah Abyei sehingga para pengungsi dapat kembali ke rumahnya dengan aman, hal ini juga dilakukan dengan meningkatkan keamanan di area perbatasan dengan membentuk Safe Demilitarized Border Zone oleh Joint Border Verification and Monotoring Mechanism yang didukung oleh UNISFA. Dengan pelatihan yang dilakukan UNISFA untuk meningkatkan kualitas kepolisian Abyei sehingga dapat menjaga keamanan wilayah Abyei dalam jangka panjang.